

**EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA  
BUKITTINGGI NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI  
LIMA (DI KAWASAN PASAR ATAS)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi  
Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

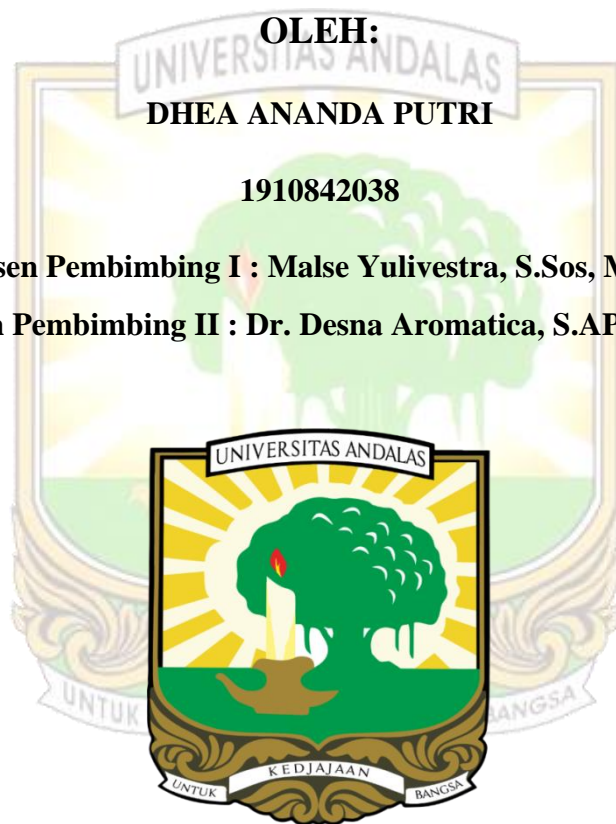
**OLEH:**

**DHEA ANANDA PUTRI**

**1910842038**

**Dosen Pembimbing I : Malse Yulivestra, S.Sos, M.AP**

**Dosen Pembimbing II : Dr. Desna Aromatica, S.AP, M.AP**



**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2023**

## ABSTRAK

**Dhea Ananda Putri, No. BP: 1910842038, Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (di Kawasan Pasar Atas), Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2023. Dibimbing oleh : Malse Yulivestra, S.Sos, M.AP dan Dr. Desna Aromatica, S.AP, M.AP. Skripsi ini terdiri dari 190 halaman dengan referensi 12 buku teori, 8 buku metode, 1 tesis, 3 skripsi, 11 jurnal, 3 perundang-undangan, 1 dokumen, dan 6 website internet.**

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL bertujuan untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, serta untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL khususnya di Kawasan Pasar Atas melihat banyaknya PKL yang berjualan di tempat yang dilarang pemerintah serta tidak berjalan beberapa aturan yang di dalam perda tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sumber data. Keabsahan data dilakukan menggunakan triangulasi sumber. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi menurut Leo Agustino yang terdiri dari lima kriteria yaitu Sumber Daya Aparatur, Kelembagaan, Sarana, Prasarana, dan Teknologi, Finansial, dan Regulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL khususnya di Kawasan Pasar Atas belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL khususnya di Kawasan Pasar Atas menurut kriteria evaluasi kebijakan Teori Leo Agustino. Adapun sasaran serta tujuan dari Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL sendiri belum tercapai. Dari hasil penelitian, Pemerintah Kota Bukittinggi dinilai belum menetapkan lokasi peruntukan untuk PKL seperti belum adanya SK terkait lokasi PKL dan belum maksimal dalam melakukan pemberdayaan PKL. Dapat disimpulkan bahwa sejak diberlakukannya Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL khususnya di Kawasan Pasar Atas hingga saat ini dapat dikatakan gagal dalam pelaksanaannya.

**Kata Kunci: *Evaluasi, Kebijakan, Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima***

## ABSTRACT

**Dhea Ananda Putri, No. BP: 1910842038, Policy Evaluation of the Regional Regulation of the City of Bukittinggi Number 8 of 2014 Concerning the Management and Empowerment of Street Vendors (in the Upper Market Area), Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2023. Supervised by: Malse Yulivestra, S.Sos, M.AP and Dr. Desna Aromatica, S.AP, M.AP. This thesis consists of 190 pages with references to 12 theory books, 8 method books, 1 thesis, 3 theses, 11 journals, 3 laws, 1 document, and 6 internet websites.**

Regional Regulation of the City of Bukittinggi Number 8 of 2014 concerning structuring and empowering street vendors aims to provide business opportunities for street vendors through determining locations according to their designation, growing and developing the business capabilities of street vendors to become strong and independent micro-economic businesses, and to create a clean, beautiful city, orderly and safe with adequate and environmentally sound facilities and infrastructure. This study aims to find out how to evaluate the structuring and empowering policies of street vendors, especially in the Pasar Atas area, seeing the large number of street vendors selling in places where the government has prohibited them and not implementing some of the rules contained in the local regulation.

This study uses a descriptive approach with qualitative methods. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation using purposive sampling techniques in collecting data sources. Data validity was performed using source triangulation. The theory used in this study is evaluation theory according to Leo Agustino which consists of five criteria, namely Apparatus Resources, Institutions, Facilities, Infrastructure, and Technology, Finance, and Regulation.

The results of the research show that Bukittinggi City Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors, especially in the Upper Market Area, has not worked well. This can be seen in the problems that occur in implementing policies for structuring and empowering street vendors, especially in the Upper Market Area, according to the policy evaluation criteria of Leo Agustino's theory. The goals and objectives of Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning Structuring and Empowering Street Vendors have not been achieved. From the research results, it is assessed that the Bukittinggi City Government has not yet determined the designated location for street vendors, as there is no decree regarding the location of street vendors and has not been optimal in empowering street vendors. It can be concluded that since the enactment of Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors, especially in the Upper Market Area, its implementation can now be said to have failed.

**Keywords:** *Evaluation, Policy, Management and Empowerment of Street Vendors*